

UU ASN Larang PNS dan PPPK Jadi Anggota Parpol, Ancamannya Dipecat

JAKARTA (IM) - Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menjadi anggota maupun pengurus partai politik (parpol).

ASN yang dimaksud meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPJK).

Ketentuan ini tertuang dalam UU ASN yang baru disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (3/10).

Pasal 52 UU tersebut mengatakan, PNS dan PPPK bakal diberhentikan secara tidak hormat jika menjadi anggota partai politik.

Pemberhentian pegawai ASN bisa atas permintaan sendiri dan tidak atas permintaan sendiri. Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan apabila pegawai ASN mengundurkan diri.

Selain aktif di partai politik, PNS dan PPPK juga diberhentikan tidak hormat jika melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dan dipidana karena tindak kejahatan.

Adapun yang dimaksud dengan pegawai ASN menurut UU ASN yang baru disahkan meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPJK).

Menurut Pasal 21 draf UU ASN, baik PNS maupun PPPK berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan materil atau non materil.

"Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materil dan/atau nonmateriel," bunyi Pasal 21 ayat (1) draf RUU ASN yang diterima Kompas.com dari anggota Komisi II DPR RI Gusparto Gaus. ● han

TNI Pamerkan Tank Leopard hingga Panser Pindad saat Parade

JAKARTA (IM) - TNI melakukan parade alutsista di Monas, Jakarta Pusat, dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 TNI. Alutsista TNI yang dipamerkan di antaranya Tank Leopard hingga Panser Pindad.

Parade pasukan dan alutsista TNI dimulai Kamis (5/10) sekitar pukul 10.00 WIB. Awalnya, dilakukan parade pasukan dari tiga matra. Lalu, acara berlanjut ke parade alutsista. TNI menunjukkan kepada publik alutsista andalannya dari berbagai matra.

Parade alutsista itu disambut antusias oleh masyarakat yang berada di Monas. Banyak dari mereka yang membawa anak dengan tujuan mengenalkan alutsista milik TNI ke si buah hati. Alutsista yang menarik

perhatian publik adalah Tank Leopard serta Panser Anoa buatan Pindad. Selain itu, publik juga tampak kagum melihat sejumlah rudal milik TNI.

Rudal-rudal milik TNI diketahui berasal dari sejumlah negara, seperti Rusia hingga Amerika Serikat. Lebih lanjut, TNI juga memamerkan alutsista yang dimiliki oleh Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Rencananya, TNI akan melakukan defile alutsista melalui sejumlah ruas jalan siang ini, mulai dari Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Medan Merdeka Barat-Jalan MH Thamrin- Bundaran Hotel Indonesia. Defile akan berakhir di gerbang barat laut Monas. ● mei

KPU Dikritik Ulur Waktu Revisi Aturan Caleg yang Dibatalkan MA

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang tak kunjung merevisi Peraturan KPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2023 soal pencalonan. Padahal sejumlah pasal di dalamnya telah dinyatakan Mahkamah Agung (MA) melanggar UU Pemilu.

"ICW mengecam sikap KPU RI yang terkesan mengulur-ulur waktu dalam menindaklanjuti Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2023," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, pada Kamis (5/10).

Di dalam putusan itu, MA telah memerintahkan KPU mencabut aturan yang memberikan eks terpidana dengan ancaman 5 tahun penjara atau lebih pengecualian soal jeda waktu mencalonkan diri setelah bebas murni.

Sementara itu, saat ini, tahapan pencalonan anggota legislatif sudah memasuki penyusunan daftar calon tetap (DCT) yang tidak dapat diubah lagi nantinya.

"Bukannya segera merevisi PKPU bermasalah tadi, KPU justru bergerak lambat

dan berdalih masih melakukan pembahasan dan mendengarkan masukan dari pakar hukum pada 2 Oktober lalu yang justru patut dipertanyakan esensinya," kata Kurnia.

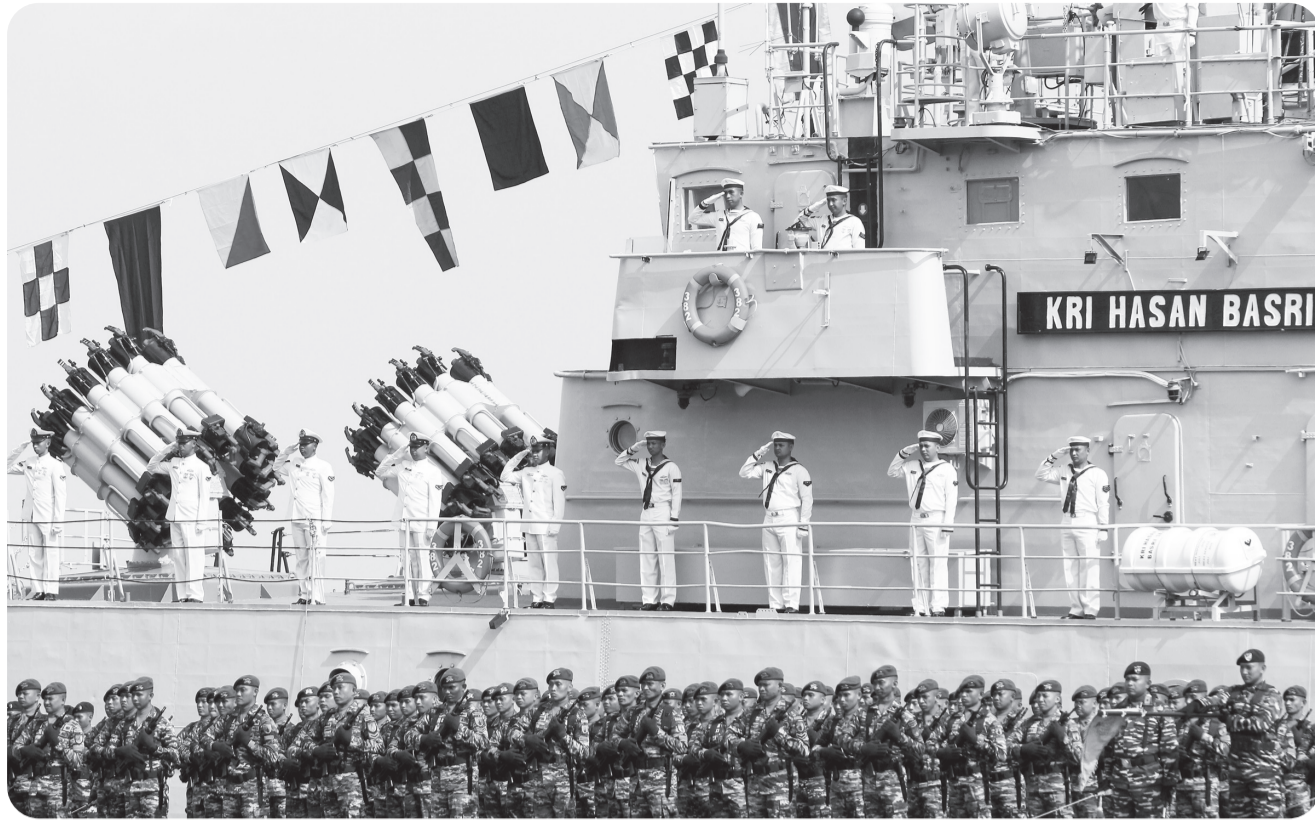
"Satu-satunya tindak lanjut yang perlu dan harus dilakukan pasca keluarnya Putusan MA adalah merevisi Peraturan KPU 10 dan 11 Tahun 2023. KPU harus ingat bahwa Putusan MA bersifat final dan mengikat, sehingga tidak diperlukan lagi upaya mencari pandangan hukum dari berbagai pihak dengan maksud untuk menghindar dari perintah yang disebutkan dalam putusan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari hanya menerbitkan surat dinas pada 1 Oktober 2023 kepada partai politik peserta Pemilu 2024 untuk "memedomani" dua putusan MA tersebut.

Harapannya, partai politik menarik atau mengganti caleg-caleg yang tak memenuhi syarat berdasarkan putusan MA tersebut di sisa waktu pencermatan DCT yang berakhir 3 Oktober 2023 lalu. ● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PERINGATAN HUT TNI DI KOARMADA II
Prrajurit TNI melakukan penghormatan saat peringatan HUT ke-78 TNI di Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/10). HUT ke-78 TNI mengangkat tema TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju.

Jokowi Dinilai Berpeluang Cukup Besar Gantikan Megawati Jadi Ketum PDI-P

Jika Jokowi yang memimpin PDI-P dianggap dapat semakin menguatkan citra sebagai partai "wong cilik".

JAKARTA (IM) - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoiril Umam menilai usulan putra sulung Presiden Sukarno, Guntur Soekarnoputra, agar Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum PDI-P usai melepas jabatan presiden, bisa saja terwujud.

Meski demikian, menurut Umam, hal ini akan tergantung bagaimana format Kongres PDI-P pada 2025 untuk memilih pemimpin partai dilakukan. Jika pemilihan menggunakan sistem terbuka di mana DPD dan DPC diberikan kebebasan untuk memilih calon Ketum PDI-P yang baru, peluang Jokowi memimpin partai banteng cukup besar.

"Jokowi sendiri masih memiliki bekal populisme dan elektabilitas yang memadai untuk menggaet basis dukungan publik," kata Umam kepada wartawan, Kamis (5/10).

Di bawah kepemimpinan Jokowi, PDI-P justru bisa menguatkan citranya. Di

mana, citra sebagai partai "wong cilik" semakin melekat jika kepemimpinan PDI-P dijalankan oleh Jokowi yang kuat mempunyai basis dukungan dari publik.

"Sehingga tampilnya Jokowi sebagai Ketum partai bisa menguatkan citra PDI-P sebagai partai yang dekat dengan rakyat. Partainya wong cilik," katanya.

Kendati demikian masih adanya tantangan bagi Jokowi untuk bekerja lebih keras berkontestasi dalam pemilihan ketua umum PDI-P. Tantangan yang dimaksud jika PDI-P kembali menggelar Kongres dengan agenda pemilihan ketua umum secara aklamasi.

"Jika metode pemilihannya menggunakan sistem aklamasi, maka pola rekrutmen calon-calon Ketum PDI-P yang baru akan cenderung terkooptasi oleh kekuatan status quo," jelasnya.

Hampir dapat dipastikan, tidak akan banyak memberi ruang terbuka bagi para pendatang baru untuk bermanuver dan mengkonsolidasikan jaringan kekuatannya di DPD

maupun DPC untuk mendukung pencalonannya dalam suksesi kepemimpinan PDI-P yang baru.

Dengan kata lain, lanjut Umam, jika PDI-P tetap kukuh pada skema aklamasi, maka peluang Jokowi untuk masuk dalam ajang kontestasi regenerasi kepemimpinan partai akan relatif terbatas. Di saat yang sama, model pendekatan aklamasi ini akan memberikan peluang besar bagi Ketua DPP PDI-P sekaligus putri Megawati, Puan Maharani untuk tampil sebagai ketua umum yang baru.

"Karena bagaimanapun juga, selain Puan merupakan trah langsung dari Soekarno dan Megawati, Puan sendiri juga merupakan pekerja partai yang selama ini betul-betul siang malam mengurus dinamika, stabilitas dan efektivitas infrastruktur partai," jelasnya.

"Sehingga wajar jika Puan mendapatkan mandat amanah dalam estafet kepemimpinan di PDI-P," kata Umam menambahkan.

Di sisi lain, Umam menilai PDI-P perlu mencermati pendekatan aklamasi yang akan menjadi "karpet merah" bagi Puan sebagai ketua umum. Sebab, tak dipungkirinya, kondisi demikian

akan dituding sebagai cara-cara politik tradisional yang melanggengkan sistem patronase dan politik dinasti.

"Namun memang patut diakui, pendekatan politik tradisional itu terbukti efektif mengkonsolidasikan mesin politik PDI-P, serta membentuk kuat karakter, loyalitas dan kegigihan kader-kader PDI-P dalam menghadapi berbagai transisi politik dan jatuhnya PDI-P di hadapan kekuasaan politik di negeri ini," ujar Umam.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hastu Kristiyanto mengatakan, hari ini bukan merupakan momentum membicarakan pergantian Ketum di par-

tai banteng moncong putih. Pembicaraan partai saat ini adalah soal persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yakni Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Bagi PDI Perjuangan, semua itu ada tahapan-tahapan. Tahapan saat ini adalah pemilu serentak presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif, kemudian setelah pemilu nanti partai akan mengadakan rapat kerja nasional yang kelima dan kemudian kongres baru akan dilaksanakan pada tahun 2025," kata Hastu ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10) kemarin. ● han

Nasdem Minta Mahfud MD Tak Ikut Campur soal Kasus Mentan di KPK

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum) Mahfud MD tak ikut campur soal penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ahmad Ali menyampaikan hal ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang mengatakan, KPK telah menetapkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka.

"Kadang kala Pak Mahfud juga yang bukan urusannya, dia urus. Bahwa ia mengetahui informasi dan apa pun itu harus proporsional," ujar Ali kepada wartawan, Kamis (5/10).

Baginya, sangat mungkin informasi yang diterima Mahfud merupakan bagian dari strategi yang dilakukan KPK. Sebab, saat ini pun belum ada pernyataan resmi dari lembaga antirasuah itu terkait status hukum Syahrul.

"Kalau memang betul ada pembicaraan di situ ya biarin saja. Jadi sebaiknya masing-masing orang bekerja sesuai dengan tupoksinya saja," ucapnya.

Ahmad Ali meminta Mahfud membiarkan KPK bekerja dan memberikan informasi pada publik. "Biarlah si Ali Fikri yang menyampaikan keterangan-keterangan seperti itu. Kemudian belum tentu update yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu juga betul kan," katanya.

Sebagai informasi, tim KPK telah melakukan pengecekan ke rumah dinas Syahrul di Jakarta dan menemukan uang tunai senilai puluhan miliar rupiah. Terkait kasus ini, Mahfud mengaku mendapatkan informasi dari KPK bahwa Syahrul sudah menjadi tersangka.

"Bahwa dia sudah tersangka? Ya, saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau eksposenya itu kan sudah lama kalau tersangka," ucap Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10).

Sita Audi A6
Tim KPK pada Rabu (4/10) kembali melakukan penggeledahan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Kali ini yang digeledah adalah rumah pribadi Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar. "Tim Penyidik telah selesai melakukan penggeledahan di wilayah Kota Makassar. Beralamat di Jalan Pelita Raya dan Jalan Bumi 13 Blok C Perum B BPH Makassar," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (5/10).

Dari rumah Yasin Limpo, petugas KPK menyita satu unit mobil mewah, Audi A6, dan mengamankan sejumlah dokumen.

"Dari lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa 1 unit mobil merek Audi A6 dan sejumlah dokumen," katanya.

Sebelumnya, KPK menggeledah Rumah Dinas Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah penggeledahan di Rumah Dinas, KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Kementan pada Jumat 29 September 2023.

KPK dikabarkan juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, Mentan Syahrul Yasin Limpo; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyo; serta Direktur Alat Mesin Pertanian, Muhammad Hatta. Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari Syahrul Yasin Limpo ihwal penetapan tersangka hingga penggeledahan oleh KPK di rumahnya. Begitu juga dari Kasdi Subagyo dan M Hatta. ● han



PERINGATAN HUT KE-78 TNI

Lima pesawat KT-1B Wong Bee TNI AU membentuk formasi terbang pada peringatan HUT ke-78 TNI di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta, Kamis (5/10). HUT ke-78 TNI mengangkat tema TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju.

28 WNI Korban TPPO Dipulangkan dari Kamboja ke Indonesia oleh Kemenlu

JAKARTA (IM) - Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) pulangkan 28 warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari Phnom Penh, Kamboja ke Indonesia.

Puluhan WNI tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan pendampingan staf KBRI Phnom Penh pada Rabu (4/10) sore.

Mereka telah menjalani proses pemeriksaan oleh otoritas Kamboja. Hasil pemeriksaan itu dinyatakan bahwa 28 WNI tersebut terindikasi sebagai korban TPPO. Demikian dilansir dari keterangan pers Kemlu RI, (5/10).

Sebelumnya 27 dari 28

WNI tersebut terindikasi mengalami eksploitasi di perusahaan online scamming di Poipet, Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja.

Melalui koordinasi intens antara KBRI Phnom Penh dengan Kepolisian setempat, pada 28 Juni 2023 para WNI tersebut dijemput dari sebuah penginapan di Poipet, kemudian mereka dipindahkan ke Kantor Department of Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection, Kepolisian Pusat Phnom Penh untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Sebelum kemudian pada 14 Juli 2023, ke-27 orang WNI tersebut dipindahkan ke penampungan sementara di shelter yang dikelola sebuah lembaga, Caritas.

Pada 5 September 2023, Kepolisian Kamboja juga menyelamatkan 1 orang WNI yang dulunya bekerja di perusahaan yang sama dengan ke-27 orang WNI yang telah diselamatkan sebelumnya, namun telah dipindahkan ke perusahaan online scamming lainnya di Provinsi yang sama.

WNI tersebut kemudian dipindahkan ke Phnom Penh dan langsung ditempatkan di shelter Caritas untuk menjalani proses lebih lanjut bersama ke-27 orang WNI lainnya. Selama tinggal di shelter Caritas, KBRI Phnom Penh memberikan bantuan logistik, obat-obatan, serta pembiayaan rumah sakit bagi 3 orang WNI. KBRI Phnom Penh selalu memberikan pendampingan penerjemah selama proses

wawancara, baik di Kepolisian maupun di Kementerian Sosial, Veteran dan Rehabilitasi Pemuda Kamboja.

Dalam perkembangannya, Kementerian Sosial, Veteran dan Rehabilitasi Pemuda Kamboja mengirimkan surat kepada KBRI Phnom Penh yang menyatakan bahwa ke-28 orang WNI tersebut terindikasi sebagai korban TPPO berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh otoritas Kamboja. Menindaklanjuti hal tersebut, KBRI Phnom Penh segera berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Kamboja terkait status keimigrasian dan surat izin bagi ke-28 WNI yang akan dipulangkan.

Setibanya di tanah air, rencananya ke-28 orang WNI

tersebut akan ditampung di RPTC Kementerian Sosial di Bambu Apus untuk menjalani proses rehabilitasi sebelum dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Selain itu, mereka juga akan menjalani proses asesmen lanjutan oleh Bareskrim Polri untuk proses penyidikan dan penindakan lebih lanjut terhadap agen perekrut di Indonesia.

Kamboja menjadi negara dengan tren peningkatan kasus WNI terkait online scamming tertinggi hingga delapan kali lipat dari 2021 ke 2022. Pemerintah RI senantiasa mengimbau agar masyarakat Indonesia berhati-hati dalam menerima tawaran kerja yang meneruji jabatan eksploitasi perusahaan online scamming. ● han

RALAT PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Pengumuman Penurunan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan / Disetor PT. Jaya Abadi Indonesia yang dimuat di surat kabar Harian International Media tanggal 5 Oktober 2023, terdapat ralat atas sebagian informasi sebagai berikut:
- Pada bagian nama Perusahaan yang tertulis PT. Jaya Abadi Indonesia diralat menjadi PT. Jaya Abadi Indonesia.
Demikian ralat pengumuman ini disampaikan.
Jakarta, 6 Oktober 2023
Direksi
PT. Jaya Abadi Indonesia